



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekjen Kemensos dan (TNP2K)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 18 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 15.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Verifikasi, Validasi dan Data Kemiskinan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya
Ketua Rapat	: <b>Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 19 dari 26 Anggota Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Orang Anggota Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI Izin. 3. SEKJEN Kemensos Beserta Jajaran 4. Kepala Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.30 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI, Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dengan didampingi Wakil Ketua, MPA., H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, dengan agenda **“Pengelolaan Data Kemiskinan yang Real Time dan Up to Date”**, dapat dicatat beberapa hal sebagai:

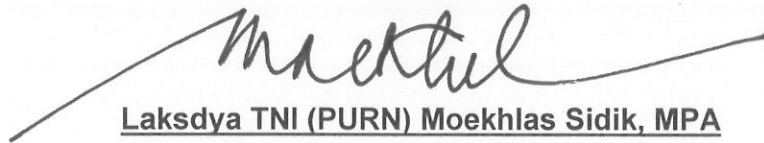
1. Angka kemiskinan sampai sekarang masih simpang siur, ada yang mengatakan 27juta rumah tangga tetapi juga ada yang mengatakan 24juta rumah tangga sehingga perlu verifikasi dan validasi.
2. Pemerintah Daerah tidak memiliki dana untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan sehingga Dinas Sosial setempat tidak bisa bergerak atau memilih untuk menyontek data dari instansi lain.
3. Pendataan penduduk pra-sejahtera jangan hanya menggunakan pendekatan makanan sebab banyak juga yang bisa makan yang mencukupi jumlah kalori yang dibutuhkan tetapi tidak memiliki penghasilan.
4. Kesalahan pendataan baik *inclusion error* maupun *exclusion error* cukup tinggi sehingga program bantuan sosial banyak yang tidak tepat sasaran sehingga perlu diperbaiki pendataannya.
5. Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar mau melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan maka perlu diberikan hukuman atau *punishment* misalnya dengan mengurangi jumlah program yang digelontorkan ke daerah tersebut.
6. Angka kemiskinan perlu terus disinkronkan sebab data kemiskinan versi BPS dengan Kementerian Sosial tidak sama, jika BPS menggunakan instrumen angka sedangkan Kementerian Sosail menggunakan orangnya.
7. Data 30 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN/BPJS) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI berada di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 97,3 juta jiwa yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI sehingga jumlah penerima bantuan sosial jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.
8. Perlu ada pengecualian dan terobosan baru dalam meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat memperbaiki kualitas data yang sudah ada, misalnya dengan menggunakan SIKSdroid (menggunakan *handphone* berbasis android).

9. Anggaran pendataan dapat diambil dari dana desa sebab dalam Peraturan Menteri Sosial RI No 28 Tahun 2017 diatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI  
PANJA VERIVIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN,  
KETUA,



Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA